

MODERNISASI PESANTREN: PERGESERAN TRADISI DAN PUDARNYA KYAI

Zulfikri

This article is aimed at studying the bias of the pesantren orientation, pesantren transformation and its implication on the institutional development of the pesantren. The findings give indication that this educational institution has, slowly but surely, been unable to realize its identity as the agent of social changes. At the same time, young generation who are graduates of both general and Islamic high schools and universities have begun to play a strategic role in the management and leadership of pesantren in particular and ummah in general. Therefore, it is essential for pesantren to understand the basic idea of modernization in education. With this knowledge, pesantren will be able to make some revision toward the ideal form of pesantren in the future.

A. Pendahuluan

Sejak dulu dan sampai sekarang, pesantren diakui sebagai pionir terciptanya kader-kader intelektual muslim *genuine* dari nusantara, sebagai bukti bisa dikemukakan di sini bahwa di masa pertumbuhan Islam di nusantara muncul sederet nama ulama intelektual terkenal di berbagai kawasan dunia Islam. Proses transmisi keilmuan berjalan antara Haramain dan Kawasan Nusantara sehingga melahirkan jaringan intelektual yang luar biasa pengaruhnya. Nur Al-Din Al-Raniri, Abd Al-Rauf Al-Sinkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari adalah tiga mata rantai utama jaringan ulama di nusantara yang terkait de-

ngan Ahmad Al-Qusyasyi dan Ibrahim Al-Kurani sebagai inti jaringan ulama abad ke 17. Bisa juga disebutkan di sini nama-nama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Abd Al-Shomad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (dan banyak lagi yang lain untuk tidak menyebutkan semuanya) yang menjadi mata rantai penting di kalangan ulama yang terlibat dalam jaringan. Belum lagi Wali Songo yang punya jaringan intelektual tersendiri (*special*) yang telah dianggap sebagai tokoh pertama yang melembagakan pesantren.

Tulisan ini membatasi diri dengan memfokuskan pembahasan untuk menelaah lebih dalam per-

geseran orientasi dan metode pembelajaran dari waktu ke waktu di pondok pesantren, dari metode pembelajaran klasik (*classical curriculum*) ke metode pembelajaran modern (*modern curriculum*). Ilustrasi diatas sebagai romantisme dan cermin tolak ukur yang dapat menjadi benang merah akan dibawa kemana orientasi pondok pesantren ke depan.

Siapapun mafhum bahwa pesantren lekat dengan figur Kyai (*Buya* di Sumatera Barat, *Tuan Guru* di Lombok, *Ajengan* di Jawa Barat dan *Bendoro* di Madura). Pengakuan terhadap karomah dan kealiman seorang Kyai juga terefleksi dengan akrab dalam sebutan *Syekh* atau *Wali*. Kyai tidak hanya menjadi figur sentral, otoritatif dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan dalam lingkungan pesantren tetapi juga menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Karena itu, perubahan atau inovasi apapun yang dilakukan pesantren semestinya berangkat dari "keinginan" pihak pesantren sendiri - walaupun ada ide dari luar tidak sampai mewarnai esensi utama pesantren - dalam hal ini kyai memegang peranan penting (*significant roleplay*). Sekian banyak pesantren menjadi maju karena kreatifitas inovatif yang dilakukan Kyai sendiri. Hal ini bukan berarti menafikan pengaruh dari luar. Sejak tahun 1970-an pemerintah Orde Baru melancarkan ide modernisasi

pesantren yang digiring ke arah pandangan dunia (*world view*) dan sugesti instruktif agar pondok pesantren lebih responsif terhadap kebutuhan zaman (baca: pembangunan). Di samping itu, pembaruan pesantren juga diarahkan untuk fungsionalisasi (atau tepatnya refungsionalisasi) pesantren sebagai salah satu agen pembangunan masyarakat. Kedudukan dan posisinya yang khas dianggap bisa menjadi alternatif pembangunan yang bertumpu pada masyarakat itu sendiri (*people-centered development*) dan berfungsi ganda sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (HS Mastuki, 2003). Pengembangan dari gagasan itu pesantren diharapkan tidak lagi sekedar menjadi lembaga pendidikan, tetapi sekaligus menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Beragam respon dunia pesantren menghadapi gagasan modernisasi tersebut. Sebagian pesantren secara tegas menolak campur tangan pemerintah dalam pendidikan pesantren karena dianggap bakal mengancam eksistensi pendidikan khas pesantren. Yang lain memilih menerapkan "kebijakan hati-hati", tetapi sebagian besar pesantren memberikan respon positif dan adaptif dengan mengadopsi sistem 'persekolahan' (baik mad-

rasah maupun sekolah umum), dengan konsekuensi logis melucuti bagian esensial dari fungsi klasik mereka sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islam.

Bisa difahami jika respon sebagian pondok pesantren dengan keras dan tegas menolak ide modernisasi ini, selain akan memudarnya ciri khas pesantren, ternyata di kemudian hari seringkali pondok pesantren dijadikan alat partisipasi pasif dalam politik terutama menjelang pemilu, sebagai sarana mendulang suara. Tetapi pada praktiknya ketika pemerintahan sudah berjalan stabil seringkali pondok pesantren atau umat secara umum ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan untuk rakyat. Walaupun di era belakangan banyak Kiai "manggung" di gelanggang politik tetapi tetap saja kerap kali menjadi bulan-bulanan para "petualang politik". Yang membuat saya semakin prihatin adalah fenomena Kyai (tokoh agama) baik secara pribadi maupun pondok pesantren secara kelembagaan mengalami reposisi fungsi dan makna. Kalau di zaman keemasan Islam ulama (kiai) duduk bersanding dengan umaro' (pemimpin pemerintahan), bahkan menjadi guru spiritual dan penasihat raja atau khalifah, serta kerap kali raja atau khalifah berkunjung secara pribadi dengan hormat kepada seorang ulama untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah

kemasyarakatan, maka penomena sekarang tampak mulai berbalik, para alim ulama (kyai) berlomba-lomba bermanis muka (baca: mencari muka) di depan penguasa, salah satu sebabnya akibat dari ketidakmandirian kyai dan pesantrennya dalam menjalankan roda dan misi pesantren. Alasan profan (baca: ekonomi) seringkali menjadikan posisi kyai mengalami 'pelecehan'. Walaupun esensi tulisan ini tidak berbicara dalam wilayah politik, bukankah Nabi sendiri secara integral menunjukkan (mencontohkan) dua sisi integritas maha tinggi, sebagai rasul (pemimpin spiritual) dan sebagai khalifah (pemimpin pemerintahan).

Sampai saat ini pesantren telah mengalami perkembangan luar biasa dengan corak yang sangat beragam. Bahkan beberapa telah muncul bak sebuah 'kampus mercusuar' yang memiliki berbagai kelengkapan fasilitas yang bisa mewadahi minat, bakat dan potensi santri, tidak hanya dari segi akhlak, nilai, intelek, emosional dan spiritualitas, tetapi juga atribut-atribut fisik dan material - bahkan di antaranya sudah bertaraf internasional - dalam usaha melestarikan ciri khas dan keaslian, pondok pesantren tetap menggunakan metode klasik yang sudah ada seperti *sorogan* dan *bandongan*, di samping metode modern murni, kebanyakan pesantren mengadopsi sistem yang lebih moderat yaitu sistem

klasikal-formal (kurikulum terpadu) (Sulthon Masyhud, 2003).

Tulisan ini mencoba mengemukakan berbagai implikasi sosial dari adanya adopsi "sistem baru" di pesantren. Sumber utama tulisan ini adalah pengalaman pribadi penulis yang sampai saat ini masih aktif dalam kepengurusan alam pendidikan pesantren, diperkuat dengan kajian pustaka yang penulis anggap layak menjadi rujukan (referensi).

B. Implikasi Fungsi Ganda Modernisasi

Pemisahan antara urusan dunia dan urusan agama atau yang lebih dikenal dengan sekularisasi dan cakupan wilayah yang luas dalam menguasai hubungan sosial yang menjadi inti jaringan (*network*) telah menjadi fungsi sangat penting dalam modernisasi dunia pendidikan di mana yang sakral, gaib, misterius, karismatik, kehilangan pesonanya (Siebert, 1985, Mulkhan, 2001). Gejala "miring" ini secara perlahan tapi pasti, telah mengikis jumlah dan peran sosial-keagamaan serta fungsi pembinaan (*trainer*) dari ahli agama (*syariah*) atau Kiai sebagai figur sentral yang menjembatani secara langsung dalam hubungan kemasyarakatan. Kondisi kemerosotan ini sebaliknya membuka peluang lebar bagi akses "kader" pendidikan modern untuk masuk ke gelanggang jaringan dan dunia pendidikan, yang pada gilirannya menggeser elite lokal sebagai garda

depan yang mengusung metode klasik dan gerakan pemurnian Islam.

Menarik dikemukakan di sini tulisan Abdul Munir Mulkhan dalam penelitian sebuah disertasinya yang mengamati modernisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Dalam analisisnya yang cukup tajam, dia berujar bahwa merosotnya peran penting ahli syariah sebaliknya membuka peluang bagi Muhammadiyah meluas ke daerah pedesaan dalam masyarakat petani. Berbarengan dengan itu kaum puritan tersisih, dan pemberantasan takhayul, taklid, bid'ah, dan khurafat melemah. Dengan bahasa menarik dia mengistilahkan gerakan ini dengan pemberantasan TBC. Selanjutnya terjadi akomodasi terhadap gerakan pemberantasan TBC (takhayul, bid'ah, churafat), berbeda ketika gerakan ini didominasi ahli syariah. Dominasi elite ahli syariah mulai melemah bersama meluasnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan modern. Lebih jauh dia menguraikan bahwa sekitar tahun 1920-an, generasi perintis berhasil mendirikan HIS dan Schakel School di daerah subur basis Muhammadiyah. Empat puluh tahun kemudian, lulusan kedua sekolah modern itu mulai menggeser elite lokal gerakan ini. Ketiadaan keahlian ilmu syariah dan akses luas hubungan sosial, menyebabkan Muhammadiyah setempat kehilangan kekuatan utama memberantas TBC. Gejala yang

sama juga muncul di tingkat nasional yang mencapai puncaknya tahun 1995. Pola pemurnian Islam mulai diubah, sehingga lebih terbuka dan toleran pada TBC dan tradisi lokal. Sebuah catatan penting bahwa modernisasi pendidikan Islam tidak selalu mendorong Islamisasi ditolaknya tradisi agama rakyat yang sinkretik. Dalam masyarakat petani pedesaan yang tidak tersentuh pengaruh urbanisasi, islamisasi hanya berarti rasionalisasi TBC. Nujubulan, slametan bayi dan kematian, dan tahlilan diberi nilai batin, kekuatan roh diganti "perkenan" Tuhan dengan fungsi tradisional magis. Oleh karena itu, islamisasi melalui penyaringan budaya lokal dan modernisasi pendidikan telah gagal menahan arus pribumisasi Islam tradisi (Abdul Munir Mulkhan, 2001).

Sementara unsur-unsur profan; organisasi dan pimpinan disakralisasi sebagai media kesalehan memperoleh "restu" Tuhan bagi jaminan keselamatan dunia dan ukhrawi. Hanya sedikit yang teguh memurnikan Islam mewarisi generasi perintis ahli syariah skripturalis. Gerakan radikalisme muncul karena merasa terancam perubahan sosial dan memenuhi panggilan Tuhan untuk mengubah keadaan. Sebagian lebih memilih mengisolasi diri sambil kontemplasi membersihkan jiwa menunggu Tuhan mengubah situasi sosial yang dekaden. Sama halnya kaum Murji'ah di abad pertengahan yang

mundur dari perang pemikiran kalam dan percaturan politik masa daulah Bani Abbasiyah, memilih bersikap menyerahkan sepenuhnya segala persoalan pada Tuhan. Sangat kontras dengan kaum Mu'tazilah yang mengagungkan pemikiran rasional dan mewarnai alam diskursus intelektual dan percaturan politik Abbasiyah.

Dalam kasus Muhammadiyah ini pergeseran nilai dan modernisasi sistem pendidikan pada akhirnya mendorong sikap taklid pada elite lokal di dalam ikatan tradisi agama lokal. Sepanjang tersedia elite ahli syariah yang dominan, muncul radikalisme dari kelompok minoritas, atau pilihan sebaliknya bersikap toleran dan inklusif. Pada tahap nasional, pemurnian Islam dikembangkan dengan pendekatan kultural pada budaya lokal dan sufisme teoritis, tanpa terorganisir seperti tarekat. Etika ajaran akhlak yang eksoterik nampak lebih populer daripada dimensi eksoteriknya menggeser aturan formal syariah. Sebab itu ragam ciri ajaran sufisme nampak berfungsi kembali dalam hubungan sosial terbuka. Kaum puritan gagal menduduki posisi kepemimpinan di luar kelompok. Sementara pengikut sinkretik lebih bisa membuka diri dan masuk jaringan sosial yang lebih luas. Elite gerakan ini mulai didominasi mereka yang lebih toleran terhadap praktek TBC.

Belajar dari kasus modernisasi pendidikan Islam dalam tubuh

Muhammadiyah ini, pesantren sebagai basis pengkaderan pertama dan utama umat seharusnya lebih sering berkaca dan mengoreksi diri (introspeksi). Sekalipun pola modernisasi pendidikan ini telah tumbuh subur di banyak lembaga pendidikan Islam, harus dibarengi sikap kritis sambil berusaha menemukan tipe ideal yang bisa menghadirkan nuansa asli tapi tetap *up-to-date* dengan perkembangan zaman, kalau tidak “wabah” yang menimpa sistem pendidikan Islam di tubuh Muhammadiyah akan menular ke institusi pendidikan Islam lain.

**C. Reorientasi Pendidikan Islam:
Antara Konsep Ideal Perspektif Al-Qur’an dan Tuntutan Realitas Perubahan Zaman**

Al-Qur’an sebagai sumber otentik tertulis umat Islam berisi ajaran-ajaran yang menjadi sumber (rujukan utama) ajaran Islam. Sifat fungsional al-Qur’an antara lain sebagai *bayan li al-nas* (keterangan bagi manusia) (Q.S. : 3 : 138), *huda dan wa rahmah* (petunjuk dan rahmat) (Q.S. : 10 : 157) dan *al-furqon* (pembeda antara yang hak dan batil) (Q.S. : 2 : 185 dan Q.S. : 15 : 1). Keragaman sifat fungsional al-Qur’an ini menunjukkan bahwa kandungannya meliputi berbagai aspek ajaran, pengetahuan dan informasi, tauhid, ibadah, etika dan akhlak, dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, iktibar dan sebagainya. Petunjuk al-Qur’an mengenai berbagai aspek tersebut terbagi dalam

dua tema besar, ada yang bersifat permanen dan terperinci serta ada yang bersifat global dan umum dan atau hanya dalam bentuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar saja. Dengan kata lain ada yang bersifat *Qoth’i* (baku) dan ada yang *Mutasyabihah* (perlu penafsiran). (Suyuti Pulungan, 2002).

Al-Qur’an merupakan pusaka yang diwarisi Nabi sebagai wahyu, yang selalu menjadi senjata pamungkas untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Kehadirannya diproyeksikan untuk merespon problema umat sepanjang zaman. Sifatnya yang *rahmatan lil alamin* (universal) sanggup menjawab persoalan-persoalan sosial-politik, ekonomi, dan kultural yang dihadapi umat manusia. Sifat universalisme yang disandangnya karena al-Qur’an mempresentasikan multi aspek ajaran yang merupakan solusi dari problematika kehidupan manusia. H.A.R. Gibb di dalam bukunya *Whither Islam* menyatakan, “*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilisation* (Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama, ia adalah suatu peradaban yang sempurna)”. Pernyataan ini sangat beralasan mengingat landasan “peradaban Islam” adalah “kebudayaan Islam” terutama wujud idealnya, sementara landasan “kebudayaan Islam” adalah agama. Jadi dalam Islam, tidak seperti pada masyarakat yang menganut agama “bumi” (non-

samawi), agama bukanlah kebudayaan tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan (Badri Yatim, 1995).

Sebagian besar kandungan ajarannya hanya patokan-patokan dasar. Di atas patokan dasar itulah umat Islam merekayasa kehidupannya. Bila ini dipraktekkan maka akan berlangsung hubungan dialogis antara al-Qur'an dengan realitas dinamika kehidupan penganutnya. Ini berarti wahyu ilahi itu berdialektika secara kreatif dengan realitas peradaban melalui manusia. Dengan kata lain, umat Islam harus memfungsikan akalannya untuk memahami ajaran al-Qur'an dan merealisasikannya dalam kegiatan budaya. Dengan demikian berarti mengimani pernyataan-pernyataan al-Qur'an tentang alam nyata dan alam gaib sebagai kebenaran mutlak. Hal itu juga berarti hidayah al-Qur'an tersebut benar adanya dan berfungsi untuk membimbing dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Al-Qur'an diturunkan untuk kepentingan manusia dan sangat *concern* terhadap manusia mulai dari proses awal penciptaan, proses perkembangan, dan eksistensinya menjalani kehidupan baik secara individual maupun kolektif sampai pada suatu saat kematian menghentikan eksistensinya. Bahkan ek-

sistensinya secara individual dalam alam kehidupan yang sebenarnya dan abadi tidak luput dari perhatiannya. Al-Qur'an menuturkan bahwa manusia pertama adalah Adam yang diciptakan dari tanah (Q.S. 7 : 12, Q.S. 15 : 28 dan 33). Setelah bentuk kejadiannya sempurna lalu Allah meniupkan roh ciptaan-Nya ke dalamnya. (Q.S. 38: 72, 76 dan Q.S. 15 : 29). Sedangkan manusia kedua adalah Hawa pasangan Adam. Kitab petunjuk itu menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari seorang diri atau satu jiwa, dan daripadanya Dia menciptakan istri untuknya (Q.S. 4 : 1, Q.S. 7 : 189, Q.S. 39 : 6). Dari keduanya berkembang laki-laki dan perempuan yang banyak melalui kandungan wanita dalam tiga kegelapan setelah ia mengadakan hubungan biologis dengan laki-laki (Q.S. 39 : 6).

Itu berarti proses kejadian manusia, pasca penciptaan Adam dan Hawa, berlangsung melalui reproduksi. Jika pada mulanya materi penciptaan manusia bersama berasal dari tanah maka keturunannya diciptakan dari *nuthfah* (Q.S. 35: 11, Q.S. 75 : 37-39) dan reproduksi manusia berlangsung dalam beberapa tingkatan kejadian. Artinya, tahap perkembangan kejadian keturunan Adam dan Hawa berproses secara evolusi, yaitu dari sari-pati tanah, kemudian ia menjadi sperma yang dipancarkan ke dalam rahim wanita. Air mani (sperma) menjadi segumpal darah (*'alaqah*,

sesuatu yang melekat), dari *'alaqah* menjadi segumpal daging (*mudghah*), dari *mudghah* menjadi tulang belulang (*izhama*), lalu ia dibungkus dengan daging, dan akhirnya ia menjadi makhluk yang berbentuk. Setelah kejadiannya sempurna, Tuhan menciptakan ruh ke dalamnya yang dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati (Q.S. 32 : 9)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejadian seluruh manusia (laki-laki dan perempuan), sebagai keturunan Adam dan Hawa, tersusun dari unsur materi yaitu jasmani yang berasal dari intisari tanah di alam materi atau bumi ini dan unsur immateri yaitu ruh yang berasal dari alam immateri dan unsur hayat. Unsur-unsur tersebut merupakan jati diri manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Agar manusia dapat melanjutkan evolusinya dan menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk terbaik dalam kehidupan individual maupun kolektif, maka masing-masing unsur tersebut mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan primer dan sekundernya.

Bila konsep manusia dalam al-Qur'an dikaitkan dengan usaha membangun sumber daya manusia yang berkualitas atau manusia seutuhnya sebagai salah satu faktor pembangunan, baik ia sebagai subjek maupun objek pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya dan proses

peningkatan kualitas hidup manusia baik aspek fisik, intelektual maupun rohani atau mental spiritualnya secara utuh. Untuk semua ini memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Karena pendidikan merupakan proses pewarisan dasar-dasar nilai kebenaran dan budaya untuk memanusiakan manusia. Hasan Langgulung mengatakan bahwa "Pendidikan adalah pewarisan *tamaddun* oleh generasi terdahulu kepada generasi berikut. Pewarisan itu berfungsi untuk mengeksplorasi potensi dan bakat yang dimiliki manusia dan mengeksposnya." (Pulungan, 1988).

D. Al-Qur'an dan Pendidikan

Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin-pemimpin (*khalifah*) di bumi (Q.S.: 6:165) dengan tugas mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran. Segala ciptaan Allah yang ada di alam raya ini diperuntukkan bagi manusia (Q.S.: 2:29). Tugas mengelola dan membangun dunia ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu manusia diperintahkan agar memperhatikan, mengamati dan meneliti apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi (Q.S. : 10:10). Aktifitas ini mengantarkan manusia dapat mengetahui sifat, fungsi dan manfaat segala macam benda serta hukum-hukum yang berlaku atasnya, yang disebut hukum alam (*sunnatullah/natural law*). Adanya

bebaskan manusia dari kebodohan menuju kepada kecerdasan (*min al-dzulumat ila al-nur*).

Jadi walaupun manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna kejadiannya (Q.S. 95:4), namun ia masih dalam kondisi "mentah" (belum siap pakai). Supaya mencapai eksistensi kemanusiaannya, yaitu mencapai derajat takwa, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat melaksanakan fungsinya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial memerlukan ilmu pengetahuan, masih perlu dibantu, dibimbing dan dikembangkan. Ini semua menjadi ruang lingkup pendidikan untuk mengembangkan fisik, akal, afeksi dan psikomotornya (S. Puluangan, 2002).

Pengembangan fisik diisyaratkan oleh pernyataan ayat bahwa Tuhan memberikan manusia rezeki yang baik-baik, dan memerintahkan manusia supaya memakan makanan yang bergizi dan halal, yang untuk pengelolaannya diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan afeksinya yang berakar pada hati nurani adalah melalui amal ibadah dan ajaran moral. Pentingnya pengembangan akalnya didasarkan pada firman Allah tentang Dia mengajar Adam mengenai nama-nama benda seluruhnya. Artinya manusia adalah makhluk yang perlu mengalami mutasi intelektual untuk membedakannya dengan makhluk lain. Sedangkan pengembangan psiko-

motorik disandarkan pada pernyataan ayat yang menyindir dan mengecam orang-orang yang tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan (Q.S. 61 : 2-3).

Dengan demikian, pendidikan bagi manusia yang dikehendaki oleh al-Qur'an adalah yang membangun fisiknya agar sehat dan kuat dan untuk itu diperlukan pendidikan jasmani dan perbaikan tingkat ekonominya. Membangun rohani atau spiritualnya dengan menemukan aqidah dan ajaran moral serta ibadah melalui pendidikan agama sehingga memiliki sistem nilai dan norma kebenaran dalam hidupnya. Sedangkan membangun daya pikir dipertajam melalui pendidikan intelektual dengan memberikan ilmu agama dan sains. Karena al-Qur'an mengisyaratkan bahwa tidak ada dikotomi antara pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan, sehingga ketajaman daya penalaran akan berfungsi untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara filosofis pendidikan dalam perspektif al-Qur'an sangat menekankan pada upaya pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta meningkatkan daya berfikir, memiliki keterampilan, berakhlak mulia dan berkepedulian sosial sehingga dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakatnya

hukum alam itu merupakan ketetapan Allah yang antara lain dinyatakan oleh ayat 12 surat al-Nahl. Hukum-hukum tersebut tidak akan berubah dan berlaku sejak terciptanya sampai hari akhir (Q.S.: 48:23).

Hakikat penciptaan manusia baik kedudukan dan fungsi sesungguhnya ada konsekuensi logis hanya untuk menyembah Allah (Q.S. : 51:56). Menyembah berarti mengabdikan diri dengan cara mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Sebagai balasan dari pengabdian itu akan memperoleh kebahagiaan di akherat dan kesejahteraan di dunia. Manusia diperintahkan untuk mencari kedua kebahagiaan itu sekaligus (Q.S.: 28: 77). Untuk keperluan itu Allah menurunkan petunjuk untuk dipikirkan, dipahami, ditafsirkan dan dihimpun sebagai ilmu pengetahuan untuk dihayati dan diamalkan. Petunjuk itu adalah himpunan ayat-ayat Allah yang tertulis, yang isinya mengandung kebenaran mutlak sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa (Q.S. : 2:2). Perintah al-Qur'an agar manusia memperhatikan segala sesuatu yang ada di alam semesta memerlukan observasi dan eksperimentasi sehingga diperoleh ilmu pengetahuan. Aktifitas-aktifitas ini memerlukan kemampuan berfikir kritis dan alatnya berupa ilmu pengetahuan (Suyuthi Pulungan, 2002). Demikian pula, upaya muncapai de-

rajat takwa dan cara mendapatkan kebahagiaan akhirat dan dunia memerlukan sarana tersebut. Urgensi penggunaan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan dinyatakan al-Qur'an: "Katakanlah (wahai Muhammad): "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya mereka yang memanfaatkan adalah yang dapat mengambil pelajaran" (Q.S.: 39:9). Akal atau daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia, bila digunakan dengan memperhatikan alam sekitar akan memperoleh ilmu pengetahuan (Harun Nasution, 1985). Akal pikiran merupakan potensi gaib yang mampu menuntun umat manusia kepada pemahaman dirinya, alam sekitarnya dan melawan hawa nafsunya (Mutahhari, 1984, S. Pulungan, 2002).

Secara eksplisit al-Qur'an menginformasikan bahwa derajat untuk memperoleh kebahagiaan dan kedudukan terpuji baik di sisi Tuhan dan manusia adalah dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sudah meletakkan pondasi bagi pentingnya ilmu pengetahuan, yaitu perintah *iqra'*. Kata ini tidak hanya berarti membaca, tapi berimplikasi pada pengertian mengerti, memahami, memikirkan, meneliti dan menyimpulkannya untuk dihayati dan diamalkan. Ayat pertama yang bermakna perintah membaca merupakan ajaran revolusi yang mem-

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Realitas Budaya, Adaptasi, dan Tantangan Pendidikan Islam

Budaya atau kebudayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada kapan dan di manapun manusia berada. Manusia baik sebagai makhluk biologis maupun sebagai makhluk pribadi dan sosial adalah pendukung dan pelaku kebudayaan. Karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dan dialami oleh manusia. Kebudayaan adalah gambaran kehidupan dunia dalam berbagai aspeknya. Ia diciptakan untuk dimanfaatkan guna memenuhi kepentingan dan sekaligus peningkatan kualitas hidup manusia, lahir dan batin. Karena itu, manusia dan kebudayaan mempunyai hubungan yang bersifat dialektis. Hubungan ini memungkinkan timbulnya alternatif-alternatif baru dalam kebudayaan.

Bagaimana corak dan sifat alternatif budaya baru tersebut sangat tergantung pada nilai-nilai yang mendasari pembentukannya. Artinya, corak dan tingkat kemajuan budaya dipengaruhi oleh manusia sebagai subyek budaya atas dasar nilai-nilai yang diyakininya. Karena kebudayaan secara ontologis berpusat kepada manusia. Demikian pula sebaliknya, budaya mempengaruhi sikap batin dan

perilaku manusia sebagai obyek budaya.

Sebagaimana budaya dan kebudayaan, pendidikan sekalipun dalam bentuk sederhana juga sudah ada sejak manusia ada. Pendidikan merupakan sarana pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bagaimana sikap batin dan perilaku manusia sebagai obyek pendidikan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diwariskan itu. Sebaliknya, sistem pendidikan (filsafat, tujuan dan muatan materi pendidikan, jenjang pendidikan, proses belajar dan pembelajaran) sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut manusia sebagai subyek pendidikan.

Saat ini kita hidup di era modern dengan budaya yang dibangun di atas prinsip-prinsip modernisasi yang muncul di dunia Barat sejak zaman Renaisans. Budaya modern tersebut baik di bidang sains dan teknologi, filsafat, etika, sosial, ekonomi, politik maupun di bidang pendidikan telah merambah ke seluruh penjuru dunia dan tak dapat dielakkan kehadirannya serta telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan tidak sedikit menjadi pendukungnya dengan menampilkan dirinya sebagai orang yang condong kepada *westernisasi*. Yaitu mencontoh dan mengambil gaya hidup dan budaya Barat yang dianggap sebagai sosok manusia modern dan akhirnya tersekularisasi.

Modernisasi yang dilaksanakan dalam proses pembangunan di Indonesia dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan Barat telah membawa kemajuan cukup pesat di bidang sains dan teknologi, pendidikan dan ekonomi sehingga tingkat kecerdasan dan taraf hidup masyarakat meningkat. Tetapi di samping dampak positif tersebut, budaya modern Barat yang dibangun di atas pandangan dan kepentingan praktis-pragmatis-sekularistik telah menggeser nilai-nilai kerohanian dan moral sehingga aspirasi agama dan moral tidak menjiwai proses pembangunan dan modernisasi (Faisal Ismail, 1993, S.Pulungan, 2002). Ia mempunyai kekuatan melemahkan mental-spiritual manusia dan menimbulkan benturan antara nilai sekuler dan nilai absolutisme dari Tuhan sehingga melahirkan pola pikir manusia modern yang pragmatis-relativistis. Prinsip-prinsip modernisasi telah menggeser tradisi-tradisi lokal dan sosial, nilai-nilai dan norma kultural yang sudah dianggap mapan. Lebih dari itu mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan berperilaku sekalipun nilai-nilai itu dianggap sakral yang mendasari pandangan hidupnya.

Pertarungan ideologis tersebut semakin terasa jika kita masuk lebih dalam ke bilik pesantren. Persebaran budaya modern dan kultur khas pondok seringkali menjelma menjadi perang ideologi yang sengit, mengingat pondok pesan-

tren merupakan refleksi transenden yang ada di bumi. Bisa dipahami jika filterisasi budaya di pesantren diterapkan sedemikian ketat apalagi di pondok-pondok yang masih menerapkan sistem tradisional murni. Usaha pondok pesantren seperti ini patut diacungi jempol atas usahanya mempertahankan nilai keaslian agar terhindar dari pengikisan dan pergeseran budaya barat. Namun begitu, arus Barat yang demikian kuat itu tidak semuanya bisa dibendung oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, apalagi yang sudah terlanjur mengadopsi sistem (kurikulum) modern (Barat). Secara kasat mata mereka lebih 'senang' bersikap moderat daripada menolak. Busana muslim 'gaul' dengan ciri celana dan baju ketat serta jilbab terikat di leher merupakan contoh pengikisan dan sikap moderasi-permisif yang telah menjamur di kalangan peserta didik wanita (madrasah, sekolah, universitas dan tak terkecuali pondok pesantren), dan muslimah pada umumnya. Belum lagi sikap moderat terhadap seni Barat seperti musik dan acara-acara televisi yang menampilkan *background* budaya Barat. Kekhawatiran yang lebih esensial adalah munculnya gejala perubahan orientasi dari sikap idealisme menjadi pragmatisme. Jika dahulu para pengelola, pengurus, dan tenaga pengajar di lingkungan pendidikan Islam lebih menekankan pada pengabdian dan keikhlasan dalam bekerja, maka

pelan tapi pasti sikap tersebut mulai mengalami pergeseran makna. Mereka mulai derajat pekerjaan dengan hasil apa yang bakal diperoleh, kalau dulu dengan dana dan fasilitas minim, semua berusaha mensukseskan program, sebaliknya tidak ada dana dan fasilitas, program mandeg jalan di tempat jauh dari kesan sukses telah menjangkiti etos kerja sebagian besar generasi belakangan.

Belum lagi kalau kita bicara lembaga pendidikan lain yang mengadopsi sistem pendidikan Barat modern tanpa filter membuat anak didik mudah menerima nilai-nilai dan norma-norma Barat. Di Indonesia kaum generasi mudanya, tentu mayoritas penganut Islam, tentu saja sedikit banyak akan terwesternisasi. Ini tampak dalam pola pergaulan, gaya bicara, sopan santun, pola berpesta dan rekreasi dan sebagainya mengikuti ala Barat. Pola budaya tersebut merupakan tantangan bagi pendidikan Islam. Dia bisa terasing dari masyarakat Islam sendiri, kalau tidak segera diantisipasi.

Menghadapi krisis ini para pakar mulai mencari formulasi jitu untuk memfilter dan mengadaptasi kebudayaan dengan tidak meninggalkan kultur khas yang ada di pondok pesantren. Kebudayaan dari luar yang masuk lebih diberdayakan untuk mendukung secara positif budaya khas yang sudah melekat di pondok. Oleh karena itu adaptasi kebudayaan diartikan

adanya perubahan-perubahan di unsur-unsur kebudayaan yang menyebabkan unsur-unsur itu dapat berfungsi lebih baik bagi manusia yang mendukungnya yaitu individu-individu yang berada di pondok pesantren (Parsudi Suparlan, 1997, Harun Nasution, 1991, Komarudin Hidayat, 1998, Ahmad Susilo 2003).

F. Manajemen Konflik dan Pola Kaderisasi

Konflik akan selalu mewarnai semua pengalaman manusia. Ia dapat terjadi bahkan dalam diri seseorang, yang biasa disebut sebagai konflik intra personal (*intrapersonal conflict*). Lebih-lebih konflik dapat terjadi di dalam (*within*) banyak orang atau satuan sosial, baik berapa konflik intrapersonal dan intra kelompok atau yang lebih biasa disebut konflik antar pribadi (*interpersonal conflict*), antar kelompok (*inter group conflict*) atau konflik antar bangsa (*international conflict*). Dari sini dapat kita pahami bahwa konflik tidak lain merupakan keadaan pertentangan antara dorongan-dorongan yang berlawanan, yang ada sekaligus bersamaan dalam diri seseorang. Dalam bentuk lain, konflik dapat diartikan sebagai suatu benturan, atau ketidaksetujuan, suatu kontroversi, pertentangan pertengkaran, dan lain-lain yang dapat terjadi secara perorangan maupun kelompok (S. Masyhud, 2003).

Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga yang terkait dengan banyak pihak dan kepentingan, "suka atau tidak suka" berpotensi mengalami konflik, dan konflik tersebut bisa mengambil bentuk yang beraneka ragam, seperti tipologi konflik yang telah disebutkan terdahulu. Menyadari akan besarnya konflik serta dampaknya terhadap konstruksi "budaya" dan manajemen pesantren, maka perlu memformulasikan manajemen konflik sebaik mungkin dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi akibat konflik dan mengantisipasi sedini mungkin hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di tubuh pesantren.

Konflik yang sering muncul dan kuat akan memberi dampak positif atau negatif terhadap perilaku pengurus dan anggota organisasi, termasuk komunitas pesantren. Beberapa dampak tersebut antara lain bersifat psikologis, misalnya sikap-sikap menarik diri dari komunitas pesantren dalam bentuk aliansi, apatis dan indifferensi. Ini bersifat umum yang sering mempengaruhi fungsionalisasi organisasi pendidikan. Ada pula penarikan diri secara fisik, misalnya ditunjukkan oleh sikap-sikap tidak aktif, bolos, terlambat dan keluar dari organisasi pesantren sebagai respon terhadap konflik yang tidak tertangani secara baik. Dalam beberapa kasus (yang seharusnya tidak boleh terjadi) kita dapat melihat sebuah pesantren besar dengan fasilitas

yang memadahi dengan jumlah santri yang banyak berubah menjadi pesantren yang tidak menarik, ditinggalkan sebagian besar santrinya, dan bahkan di jauhi oleh masyarakat. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri sebagai akibat terabainya pengelolaan konflik didalamnya.

Konflik yang muncul tidak selalu berdampak buruk bagi pesantren, konflik sering menyebabkan seseorang berusaha untuk meningkatkan diri dan mencari cara berprestasi paling efektif, sehingga akan meningkatkan fungsionalisasi organisasi. Di antara dampak positif dari konflik ini antara lain tumbuhnya kesadaran untuk menyatu, bekerjasama dan bersaing secara sehat, memecahkan masalah secara tepat dan demokratis. Pesantren sebagai lembaga yang inklusif (milik umat) memiliki peluang besar untuk menerima dan menciptakan gagasan-gagasan pembaharuan (*tajdid*) yang berawal dari serangkaian konflik oleh karena itu menjadi harapan bahwa para pengasuh pesantren (modern, salafi, pos modern, paripurna, terpadu atau apapun istilahnya) berusaha untuk membelajarkan para ustadz dan santri menghadapi konflik.

Bisa dikemukakan disini beberapa kemungkinan konflik yang akan muncul di pesantren adalah: (1) konflik antarguru/ustadz, (2) konflik antara ustadz dengan santri, (3) konflik antar santri, (4) konflik antara lembaga pesantren

dengan lingkungan dan (5) konflik antara pengurus dengan pengasuh/Kiai. Konflik ini akan muncul karena adanya rangsangan yang datang dari diri sendiri maupun datang dari orang lain. Rangsangan tersebut kemudian menciptakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Lebih-lebih, tindakan ini diiringi oleh rasa tidak puas karena adanya harapan yang tidak terpenuhi.

Hal-hal yang menjadi pemicu bermacam-macam konflik tersebut dapat meliputi: (a) prasangka buruk; (b) kesalahpahaman; (c) sifat keras kepala atau egois; (d) rasa peka/mudah tersinggung; (e) perbedaan interpretasi; (f) perbedaan cara / metode / pendekatan; (g) ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan; (h) perbedaan kepentingan dan kebutuhan.; (i) perbedaan latar nilai budaya; (j) perbedaan tujuan; (k) persaingan memperebutkan status / promosi; (l) berkurangnya sumber-sumber tertentu seperti: kekuasaan, pengaruh, uang, waktu, ruang, popularitas dan posisi, dan lain sebagainya.

Maka setelah diketahui kemungkinan-kemungkinan dimana akan terjadi konflik dan penyebab-penyebab yang mungkin menimbulkan konflik, para pemimpin pesantren hendaknya memperhatikannya sebaik mungkin sehingga tidak akan mengganggu jalannya proses pendidikan di pesantren. Pengabaian terhadap potensi-po-

tensi konflik sangat memungkinkan merugikan lembaga pesantren. Yang tidak kalah pentingnya adalah proses pengkaderan yang sering kali terabaikan baik sadar maupun tidak sadar.

Pola kaderisasi boleh dikatakan merupakan sisi paling lemah dalam sistem pengelolaan pesantren. Dalam kasus kebanyakan pondok, biasanya kaderisasi dilakukan dengan metode "imitasi", artinya santri yang dianggap mampu dan terpilih diangkat dalam proses kegiatan pesantren yang dilakukan para seniornya. (S. Masyhud, 2003). Harapannya para santri kader tersebut dapat menyerap kapasitas keilmuan dan prilaku yang dilakukan oleh para senior yang diikutinya. Namun demikian dalam kenyatannya banyak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada. Para santri kader sebagian kurang dapat memenuhi harapan pengkaderan tersebut. Banyak santri yang tidak dapat memenuhi harapan tersebut, sehingga semakin lama kualitas pesantren tersebut semakin menurun seiring dengan estafet pada kader yang baru.

Tentu saja sistem kaderisasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya usaha pembenahan. Sebab bila sistem tersebut dibiarkan, keberadaan pesantren akan kurang bisa mengapresiasi tuntutan masyarakat yang semakin lama semakin beragam dan menuntut kualitas yang lebih

tinggi.

Kegagalan banyak pesantren dalam kaderisasi tampaknya disebabkan karena "keliru" dalam memahami makna kaderisasi. Kaderisasi cenderung secara dominan diarahkan pada proses transmisi keilmuan, bagian lain yang penting seperti manajemen organisasi pembinaan jaringan, metode pengabdian kepada masyarakat, hubungan kemasyarakatan (*public relation*) terasa belum mendapat perhatian yang serius. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam mengatasi masalah tersebut antara lain dengan melakukan reorientasi dalam sistem kaderisasi di pesantren dengan menerapkan sistem kaderisasi "modern" yang didukung dengan pendekatan rasional ilmiah tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur pesantren yang selama ini dijunjung tinggi.

Langkah-langkah alternatif dalam proses kaderisasi modern tersebut dapat melalui tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi kader potensial sejak dini. Seleksi ini menyangkut kemampuan akademis, kualitas kepribadian, maupun kemampuan komunikasi sosialnya.
2. Pendidikan umum dan pendidikan khusus yang menunjang kebutuhan kader untuk melaksanakan tugas di masa yang akan datang di pesantren.
3. Evaluasi bertahap baik yang menyangkut kemampuan personal

akademik maupun sosialnya.

4. Pendidikan remedial bagi santri kader yang mengalami ketertinggalan dalam proses pendidikan yang ditargetkan.
5. Praktek magang, untuk mempraktekkan hasil-hasil pendidikan kader yang telah diterima.
6. Sertifikasi kader untuk menentukan apakah seorang kader telah memenuhi target yang ditetapkan atau belum.

Untuk memenuhi harapan-harapan di atas pesantren mengembangkan fungsi secara eksplisit, di samping sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, juga sebagai penyediaan kader. Khusus mengenai fungsi terakhir ini, pesantren dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait, baik dengan sesama pesantren, instansi pemerintah maupun LSM.

G. Faktor Pendukung dan Penghambat Jaringan Sosial Kiai dan Strategi Pesantren dalam Membina Jaringan Sosial.

Faktor pendukung dan penghambat jaringan sosial Kiai terhadap komunitas pondok dan masyarakatnya sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang datangnya dari Kiai itu sendiri dan dari faktor-faktor di luar diri Kiai tersebut (lingkungannya).

Faktor-faktor yang datangnya dari pribadi Kiai itu sendiri akan mendorong cepat dan lambatnya penanaman nilai-nilai ajaran agama

Islam tersebut diterima oleh para santri dan masyarakatnya. Hal ini dilandasi atas rajin dan malasnya Kiai yang bersangkutan. Bila kyai itu rajin mensosialisasikan materi-materi tersebut maka masyarakatnya pun akan menteladaninya dan meneriamanya baik secara cepat maupun lambat. Dan begitupula bila Kiai itu malas, maka sosialisasi materi akan lambat dan bahkan tidak akan diterima oleh para santrinya. Apalagi kalau Kyai bertingkah laku sebaliknya (berbuat jelek), maka penanaman nilai-nilai tersebut akan ditolak para santri dan masyarakatnya akan menyebabkan kegagalan usahanya.

Faktor-faktor dari luar pribadi Kyai (eksternal) juga menentukan keberhasilan penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam tentang materi yang sedang dijalankan bila memang masyarakatnya baik, penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam akan diterima oleh santri dan masyarakatnya. Hal ini terjadi, karena mereka membuka hatinya, sehingga dengan senang hati akan menerima segala perbuatan yang sedang disosialisasikan oleh seorang Kyai di pesantren terhadap santri dan masyarakatnya. Namun sebaliknya, bila santri dan masyarakat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maka penanaman nilai-nilai tersebut akan ditolak baik untuk sementara atau ditolak untuk selamanya. Penolakan tadi ditandai dengan tingkah laku yang negatif atas penanaman nilai-nilai

ajaran agama Islam yang sedang berjalan, bahkan mereka tidak segan-segan mencela, menggagalkan dengan jalan memusuhinya sampai mengadakan penyerangan kontak secara fisik dan teror-teror lainnya. Hal ini selalu dirasakan oleh semua pondok pesantren, terlebih oleh pondok pesantren yang baru berdiri di suatu tempat, sedangkan di tempat tersebut merupakan sarang orang-orang berbuat jelek yang melanggar norma-norma adat istiadat setempat dan ajaran agama. Mereka merasa terusik dan terganggu terhadap kebiasaan-kebiasaannya. Mereka merasa tidak bebas lagi untuk berbuat sesuatu yang biasa mereka lakukan (mencuri, berzina, mabok-mabokan, bermain judi dan membunuh). Untuk itu biasanya mereka melakukan perlawanan terhadap kehadiran Kyai.

Kegiatan jaringan sosial Kyai terletak pada getaran jiwa atau semangat untuk melaksanakannya dengan mengharap keberhasilan dibawah ridho-Nya. Getaran jiwa atau semangat ini adalah dasar utama suatu kegiatan agar berhasil baik. Hal ini tidak boleh putus atau hilang di tengah jalan, bila ingin berhasil sesuai dengan cita-cita. Seorang Kiai apabila sudah pasang niat untuk berusaha menjalankan suatu kegiatan yang baik (dakwah) yaitu menyebarkan ajaran agama Islam, pantang mundur selangkah pun, sekalipun mungkin dihadapannya akan terbentang rintangan

untuk meniggalkan. Justru rintangan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan harus ditaklukkan, meskipun harus dihadapi dengan harta dan jiwa (Al-Qur'an).

Secara kelembagaan, usaha pondok pesantren dalam membina jaringan sosial-seperti yang dilakukan pesantren Tebuireng berawal dari mengadakan hubungan-hubungan antar pribadi, antar pihak pesantren dengan pihak-pihak lain diluar pondok pesantren Tebuireng, seperti kepada pihak-pihak yang bergerak dibidang ekonomi, pendidikan, politik dan sosial lainnya. Upaya tersebut dipelopori oleh Kyai dan diterapkan oleh para wakilnya yang terdapat di dalam kelompok pimpinan yang ada di pondok pesantren. Pendelegasian tugas tadi dilakukan oleh masing-masing bidang yang mereka geluti atau seorang wakil yang mengatasnamakan kyai atau pihak pondok pesantren setelah hubungan antar pribadi atau jaringan sosial Kyai terjadi, maka selaras civitas akademika pondok pesantren mendukung program-program tersebut, sehingga dapat berjalan dengan baik. Jaringan sosial tersebut didasari atas kebutuhan-kebutuhan dari pihak pondok pesantren dalam mengikuti perubahan zaman atau sebaliknya, pihak-pihak di luar pondok pesantren mencoba menawarkan diri untuk mengadakan jaringan sosial sesuai dengan bidang mereka

sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di pondok.

H. Penutup

Modernisasi pesantren sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap kultur dan ciri khas pesantren yang selama ini dianggap pesat kaderisasi intelektual muslim yang paling *genuine*. Menilik kasus yang terjadi di tubuh organisasi besar Islam seperti Muhammadiyah, modernisasi pendidikan Islam telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan orientasi gerakan. Dalam prosesnya terlihat bahwa modernisasi telah memudahkan para ahli syariah (ilmu-ilmu agama). Gejala ini nampak dari komposisi kepemimpinan gerakan ini di tingkat nasional atau lokal dimana ahli syariah semakin langka. Hal ini tidak hanya menyebabkan elite aktivis organisasi ini semakin jauh dari tradisi Islam klasik, tetapi juga semakin sulit mengembangkan kekayaan spiritual dalam berbagai praktek ritual, lebih-lebih dalam kehidupan organisasional.

Pondok pesantren sebagai garda utama pendidikan Islam hendaknya belajar dari kasus Muhammadiyah ini, sebelum menerapkan metode atau kurikulum modern, sebab sistem modern tersebut belum tentu selalu cocok untuk diterapkan di setiap lembaga pendidikan Islam, lebih-lebih pondok pesantren.

Memang pembaharuan pendidikan itu juga penting untuk membuka hubungan sosial yang lebih luas, inklusif dan toleran. Modernisasi pendidikan yang bukan sekedar bentuk sekolah konvensional memang penting bagi kehidupan sosial yang lebih terbuka dan demokratis. Namun tanpa rancangan yang jelas program ini lebih merupakan pengeroposan gerakan Islam dari dalam tubuhnya sendiri. Yang menjadi kekhawatiran adalah akses pada ilmu modern tidak terlalu baik, terhadap ilmu Islam klasik juga semakin terputus. Sementara dalam kehidupan sosial yang semakin kompetitif, lembaga pendidikan model sekolah itu juga kurang memberikan harapan.

Sudah saatnya pondok pesantren dengan prestasinya mengembangkan agenda baru pendidikan Islam ideal. Suatu agenda bagi pencapaian kemampuan ilmu mengatasi ilmu-ilmu modern sekaligus ilmu Islam klasik. Pada saat yang sama bisa dikembangkan suatu tradisi keagamaan yang tetap relevan dengan kehidupan modern tetapi juga tetap memperkaya spiritualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syamsudin, *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Azis Tabah, Abdul, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Islami Press, 1996)

Dhofier, Zamakhsyari, "Tradisi Pesantren; Suatu Studi Tentang Peranan Kiai dalam Memelihara dan Mengembangkan Ideologi Islam Tradisional", dalam *Prisma*, 1981

Horikoshi, H., *Kiai dan Perubahan Sosial*, Terjemahan Umar Besalim dkk. (Jakarta: P3M, 1987)

HS, Mastuki, et. al. Ed, *Intelektualisme Pesantren; Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren*, Jil. I, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003)

Ibrahim, *Inovasi Pendidikan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Dikti, 1988)

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1996).

Masyhud, M. Sulton, Et. Al, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003)

Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)

Mul Khan, Abdul Munir, "Modernisasi Pendidikan Islam dan Pergeseran Elite Lokal Muhammadiyah", dalam *Jurnal Studi Islam Propetika*, Vol, 3, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Najih, Moh (ed), *Pola Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup*, (Surabaya: Kerjasama SK dan LPM Unesa, 2003)

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985)

Nasution, S, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Nasution, S, *Usaha-usaha Perbaikan dalam Bidang Pendidikan*, (Bandung: Masa Baru, 1972)

Nata, Abuddin, (editor), *Sejarah*

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001)

Pulungan, J. Suyuthi, *Universalisme Islam*, (Jakarta: Moyosegoro Agung, 2002)

Qordhawi, Yusuf, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Riyanto, Theo, *Pembelajaran Sebagai Proses Bimbingan Pribadi*, (Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2002)

Rochman Nata Wijaya, *Bimbingan Pendidikan dalam Sekolah Pembangunan*, (Semarang: IKIP Semarang, 1972)

Sardiman, AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Susilo, Ahmad, *Strategi Adaptasi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Kucica, 2003)

Sutopo, Hendiyat (ed), *Administrasi Pendidika*, (Malang: Penerbit IKIP Malang, 1990)